



# NEWSLETTER AIHSP

edisi FEBRUARI 2024

Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) adalah program kemitraan lima tahun (2020-2025) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan kesehatan nasional Indonesia guna mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit menular yang muncul pada manusia dan hewan serta meningkatkan koordinasi dan kapasitas untuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul.



AIHSP Mendukung Pengendalian Rabies di NTT

HALAMAN 1

Meningkatkan Kesadaran Ancaman Rabies terhadap Perempuan Difabel

HALAMAN 3

Pendekatan One Health untuk Ketahanan Kesehatan Global

HALAMAN 4

Komite Pengarah Program (PSC) untuk Kesehatan Hewan Bahas Rencana Kerja 2024

HALAMAN 5

Rapat Komite Pengarah Program AIHSP Bahas Rencana Kerja Komponen Kesehatan Manusia 2024

HALAMAN 6

Antusiasme warga yang berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi Rabies, bersama dengan petugas VAR yang menyuntikkan vaksin Rabies | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

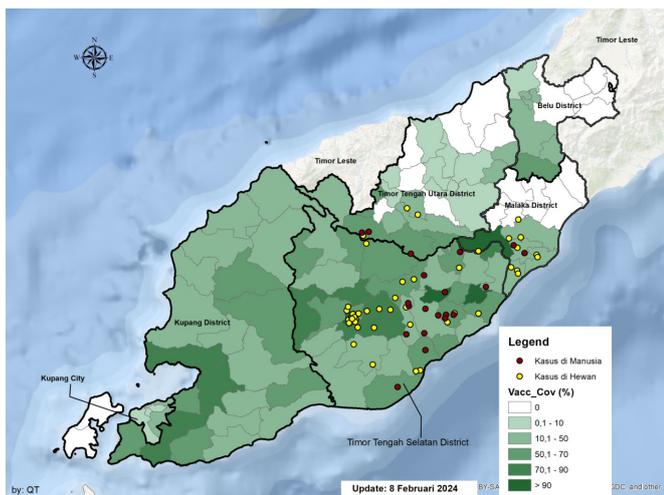
## AIHSP Mendukung Pengendalian Rabies di NTT

Kasus rabies pertama kali dilaporkan muncul di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), bagian barat Pulau Timor pada bulan Mei 2023, yang memicu respons darurat oleh otoritas kabupaten setempat dengan dukungan dari provinsi NTT. Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) telah memberikan dukungan yang kuat dalam respons darurat ini dengan memberikan bantuan teknis, pelatihan dalam penanganan dan vaksinasi anjing, serta merancang materi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko rabies. Selain itu, AIHSP juga mengkoordinasikan dukungan dari proyek-proyek Australia lainnya dan mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Australia. Mereka juga membantu memfasilitasi dukungan dari lembaga-lembaga internasional.

“Dengan kondisi pasca-COVID dan anggaran pemerintah yang terbatas, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Program AIHSP karena hadir tepat waktu di Kabupaten Belu. Dengan kehadiran program AIHSP, pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit menular baru dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Belu.”

Rine B. Baria, ST, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Belu, NTT

Respons awal terhadap kasus rabies ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah di Pulau Timor. Rabies kini telah menyebar ke tiga kabupaten, mengancam daerah yang tersisa di bagian barat Pulau Timor. Untuk mengatasi situasi yang semakin parah, pada bulan November 2023, dibentuklah satuan tugas darurat rabies yang terpadu, yang mulai beroperasi pada awal tahun 2024. AIHSP telah bekerja sama dengan satuan tugas ini di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk merumuskan rencana operasional guna mengendalikan dan memberantas rabies secara bertahap. Selain itu, AIHSP juga membantu mendapatkan dukungan teknis tambahan dari Mission Rabies, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki keahlian khusus dalam mengendalikan rabies. Mission Rabies memberikan pelatihan dalam penanganan anjing dan manajemen vaksin, serta memperkenalkan sebuah aplikasi pemetaan penyakit dan prioritas operasional yang terintegrasi dengan baik dengan sistem iSIKHNAS.<sup>1</sup> Langkah-langkah ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan petugas kesehatan hewan untuk menyampaikan program pengendalian rabies yang efektif.



Peta yang menunjukkan penyebaran kasus Rabies pada manusia dan hewan di NTT, data per 8 Februari 2024 (tercatat oleh Dinas Peternakan menggunakan iSIKHNAS).

<sup>1</sup> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional

Meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyakit Rabies sebagai bagian dari kegiatan komunikasi risiko, melalui sebuah podcast radio bekerjasama dengan salah satu media terbesar di Kupang, NTT.

Upaya menghapus ancaman rabies terhadap kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama di NTT. Diketahui bahwa untuk memerangi penyakit ini, rabies harus dihilangkan dari populasi anjing melalui vaksinasi massal. AIHSP telah bekerja sama dengan staf nasional dan akademisi dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk mengembangkan skenario pengendalian penyakit yang memodelkan opsi pengendalian penyakit dan efisiensi ekonominya (analisis manfaat-biaya). Model skenario ini digunakan untuk mengadvokasi komitmen sumber daya yang cukup untuk mengatasi rabies dalam jangka pendek serta mencegah ancaman jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan mengurangi biaya pengendalian yang tidak efektif secara berkelanjutan.



“Materi KIE sangat penting untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) agar mereka dapat mengantisipasi penyebaran virus rabies. Dengan dukungan Program AIHSP, kami dapat melakukan mitigasi agar penyebaran Rabies tidak mencapai Kabupaten Belu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Program AIHSP atas dukungan vaksin anti-rabies untuk hewan penular rabies (HPR) yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belu.”

Rine B. Baria, ST, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Belu, NTT



Perempuan yang menghadapi disabilitas merupakan salah satu dari sejumlah kelompok yang mengalami dampak berlipat ketika berkaitan dengan penyakit zoonosis | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

## Meningkatkan Kesadaran Ancaman Rabies terhadap Perempuan Difabel

Kasus rabies pertama kali dilaporkan muncul di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), bagian barat Pulau Timor pada bulan Mei 2023, yang memicu respons darurat oleh otoritas kabupaten setempat dengan dukungan dari provinsi NTT. Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) telah memberikan dukungan yang kuat dalam respons darurat ini dengan memberikan bantuan teknis, pelatihan dalam penanganan dan vaksinasi anjing, serta merancang materi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko rabies. Selain itu, AIHSP juga mengkoordinasikan dukungan dari proyek-proyek Australia lainnya dan mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Australia. Mereka juga membantu memfasilitasi dukungan dari lembaga-lembaga internasional.

Ni Ketut Leni Astuti, yang pernah mengalami digigit anjing pada tahun 2020, menyadari betapa pentingnya pencegahan rabies bagi penyandang disabilitas. Dengan menggunakan tongkat untuk berjalan, ia merasa kesulitan untuk berlari atau menghindari ketika akan digigit anjing di bagian betisnya. Setelah membersihkan luka dan berkonsultasi dengan layanan kesehatan, Leni harus menerima suntikan vaksin rabies sebanyak 4 kali selama satu bulan. Pengalaman ini membuatnya menyadari bahwa mobilitas bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan vaksin lengkap bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan.

Dengan pemahaman ini, Leni, melalui HWDI, mendukung sosialisasi pencegahan rabies bagi penyandang disabilitas melalui organisasi yang menaunginya. HWDI telah bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, serta Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) untuk memberikan sosialisasi pencegahan rabies di beberapa kabupaten di Provinsi Bali, seperti Jembrana, Bangli, Kota Denpasar, dan Karangasem.

Selain menyelenggarakan acara pemeriksaan kesehatan gratis, HWDI secara rutin memberikan layanan kesehatan gratis kepada anggotanya dan penyandang disabilitas secara umum. Mereka juga menyediakan informasi tentang kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi, untuk menjamin kesehatan pribadi mereka. Di Hari Disabilitas Internasional, Leni berharap penyandang disabilitas dapat lebih mudah mengakses informasi kesehatan, menjalani pemeriksaan kesehatan secara dini, dan wanita dengan disabilitas mendapatkan dukungan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas.



Ni Ketut Leni Nastiti (berbaju merah), Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, memimpin rapat dengan semangat dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Bali | Sumber: Dokumentasi AIHSP.



Lokakarya One Health secara khusus menyoroti manfaat pendekatan One Health di Bali | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

# Pendekatan One Health untuk Ketahanan Kesehatan Global

Saat ini, kondisi ketahanan kesehatan global berada di bawah ancaman yang semakin meningkat dengan munculnya penyakit menular, potensi pandemi lebih lanjut, dan dampak perubahan lingkungan. Oleh karena itu, sistem kesehatan yang ada untuk kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan harus lebih siap mencegah, mendeteksi, serta mengurangi risiko ancaman kesehatan yang sedang terjadi dan yang baru muncul.

One Health adalah pendekatan kolaboratif, multisektoral, dan transdisipliner dengan tujuan mencapai hasil kesehatan yang optimal dengan mengakui keterhubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Hingga kini, Indonesia secara konsisten terus menerapkan pendekatan One Health untuk menemukan titik pengaruh dalam sistem jaminan kesehatan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

Dalam rangka memperingati Hari One Health 2023, AIHSP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pemerintah Provinsi Bali serta Lembaga/badan internasional terkait lainnya menyelenggarakan lokakarya One Health selama dua hari pada tanggal 9-10 November 2023. Peserta lokakarya berasal dari seluruh spektrum One Health – kesehatan manusia, kesehatan hewan, layanan produksi, dan kesehatan lingkungan, akademisi, LSM/CSO, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional, dan difasilitasi oleh One Health Collaborating Centre (OHCC) Provinsi Bali.

“Bali menghadapi ancaman besar akibat pandemi, penyakit manusia, zoonosis dan penyakit hewan seperti rabies dan PMK, hal tersebut berdampak pada ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Keberadaan Tim koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru menjadi sangat penting untuk mengkoordinasikan upaya-upaya berbasis pendekatan One Health di Provinsi Bali. Workshop hari ini menjadi sangat strategis sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengembangan strategi kolaborasi dan komunikasi.”

Drs. Dewa Made Indra, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Lokakarya ini secara khusus menyoroti manfaat pendekatan One Health di Bali, menetapkan konteks nasional dan Bali serta manfaat pendekatan tersebut, memberikan studi kasus mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan One Health serta mengembangkan rencana kerja mengenai langkah-langkah mitigasi risiko yang akan dilakukan demi memerangi ancaman yang sedang berlangsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.

“Zoonosis adalah masalah bersama! Semangat menjaga Bali dari berbagai ancaman bencana, termasuk wabah penyakit (bencana non alam) adalah tugas mulia nan suci. Oleh karena itu, mari bergandengan tangan untuk memperkuat sinergitas guna menjaga Bali agar dapat diwariskan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, dari Bali menginspirasi Indonesia bahkan untuk dunia.”

Dr. Drs. I Made Rentin, AP, M.Si., Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, Provinsi Bali



Sambutan Pembukaan dari Dr. Drs. I Made Rentin, AP, M.Si., Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sekaligus Sekretaris Tim koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, Provinsi Bali | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

“Mengadopsi pendekatan One Health yang terintegrasi dan koordinasi lintas sektoral yang komprehensif adalah dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini dan respons cepat. Pemerintah Australia melalui AIHSP percaya bahwa pendekatan One Health dapat mengoptimalkan upaya dan pencapaian nasional, regional, dan internasional, baik itu di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, tumbuhan, dan ekosistem,” kata John Leigh, Direktur Program AIHSP.

Bali, seperti provinsi lain di Indonesia, menghadapi banyak tantangan kesehatan lingkungan, manusia, dan hewan. Mengadopsi pendekatan One Health akan memberikan Bali kemampuan untuk menemukan titik pengaruh dalam sistem jaminan kesehatan. Program kesehatan masyarakat nasional dan daerah dapat dirancang untuk mendorong atau menarik sistem ke arah yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan.



Pertemuan PSC untuk Komponen Kesehatan Hewan AIHSP | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

## Komite Pengarah Program (PSC) untuk Kesehatan Hewan Bahas Rencana Kerja 2024

Pertemuan Program Steering Committee (PSC) untuk Komponen Kesehatan Hewan dari Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) berlangsung pada 20 Desember 2023. Acara ini menandai pertemuan PSC yang ke-4 dan diresmikan oleh Direktur Kesehatan Hewan—yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, serta Minister Counsellor Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) di Jakarta.

PSC merupakan elemen krusial dari struktur tata kelola dan manajemen program AIHSP. Komite ini memastikan bahwa seluruh kegiatan program mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan Australia sebelum diimplementasikan. Selama tiga tahun terakhir, AIHSP telah berperan penting dalam mendukung Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan hewan, membentuk dasar guna pengembangan praktik baik untuk dilanjutkan oleh program-program serupa di bawah naungan DFAT.

Direktur Kesehatan Hewan, Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si, secara khusus menyoroti peran AIHSP dalam mendukung Direktorat Kesehatan Hewan dalam mengendalikan penyakit seperti Lumpy Skin Disease (LSD)<sup>1</sup> dan Foot Mouth Disease (FMD),<sup>2</sup> rabies,<sup>3</sup> dan penyakit zoonosis<sup>4</sup> lainnya. Dr. Nuryani secara khusus mengakui kontribusi AIHSP selama tanggap darurat terhadap wabah rabies di NTT. "AIHSP telah memberikan bantuan teknis, pelatihan, pengembangan pedoman, dan materi KIE<sup>5</sup> untuk pengendalian rabies yang efektif," jelasnya.

Mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin, Dr. Nuryani menyebutkan pengembangan rencana kerja 2024. Rencana ini mempertimbangkan rekomendasi seiring berakhirnya program AIHSP pada Januari 2025. Fokus utama akan diberikan pada kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun terakhir penyelenggaraan AIHSP, sekaligus memberikan dukungan untuk proyek-proyek kesehatan baru yang sedang dipertimbangkan oleh DFAT.

Minister Counsellor Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia DFAT, Ms. Madeliene Moss, memberikan pujian atas kemitraan yang kuat antara Pemerintah Australia melalui AIHSP dan Direktorat Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Beliau menguraikan poin-poin penting dalam rencana kerja 2024, dengan fokus pada dukungan berkelanjutan untuk Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), bantuan dalam pengembangan komunikasi risiko, dan penyediaan vaksin rabies untuk mengendalikan wabah rabies di Timor. Ms. Moss menegaskan komitmen Pemerintah Australia untuk terus mendukung dan berkolaborasi setelah penutupan AIHSP pada Januari 2025.

<sup>1</sup> Lumpy Skin Disease (LSD) adalah penyakit yang umumnya menyerang sapi dan disebabkan oleh virus.

<sup>2</sup> Foot Mouth Disease (FMD) adalah penyakit yang mempengaruhi hewan berkuku seperti sapi, kambing, dan babi.

<sup>3</sup> Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf dan umumnya ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi.

<sup>4</sup> Penyakit zoonosis adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia.

<sup>5</sup> KIE adalah singkatan dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dan sering digunakan dalam konteks program kesehatan atau pendidikan untuk merujuk pada upaya menyediakan komunikasi, informasi, dan pendidikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu.

Selama pertemuan, berbagai pencapaian diakui, termasuk penyediaan 1 juta dosis vaksin LSD sejak 2023—melalui DAFF,<sup>6</sup> kolaborasi sukses dalam mengatasi larangan perdagangan, pelatihan *biosecurity*<sup>7</sup> untuk staf Kementerian Pertanian, dan kerjasama untuk influenza burung. Pertemuan juga membahas rencana program mendatang, termasuk pengembangan program DFAT berikutnya, rencana kerja prioritas untuk Kesehatan Hewan AIHSP tahun 2024, dan kolaborasi dengan sektor pemerintah lainnya, dengan menekankan transisi yang lancar setelah AIHSP berakhir.

Ms. Moss menjamin dukungan Pemerintah Australia untuk transisi yang lancar dalam program sektor kesehatan, dengan kemajuan dan opsi dievaluasi dalam enam bulan mendatang. Konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan akan dilakukan sebagai persiapan untuk program baru.

Dr. Nuryani memberikan tanggapan dengan merinci cakupan rencana kerja dan kolaborasi dengan BRIN. Beliau mengkonfirmasi persetujuan kementerian terhadap rencana kerja AIHSP dan BICOLLAB<sup>8</sup> yang diusulkan, memastikan dukungan berkelanjutan untuk iSIKHNAS.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara AIHSP, DFAT, dan mitra Pemerintah Indonesia, jelas bahwa program ASIHSP telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan ketahanan kesehatan, terutama dalam kesehatan hewan di Indonesia. Dukungan yang berkelanjutan, termasuk rencana kerja 2024, menandai komitmen bersama untuk memastikan keberhasilan berlanjut dalam program ini. Diharapkan kerjasama erat ini akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan.

<sup>6</sup> DAFF merujuk pada Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan untuk Pemerintah Australia.

<sup>7</sup> *Biosecurity* adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi organisme hidup dari penyakit dan ancaman kesehatan lainnya.

<sup>8</sup> BICOLLAB adalah kolaborasi antara tim internasional ACDP dan Pusat Veteriner Indonesia di Wates.

## Rapat Komite Pengarah Program AIHSP Bahas Rencana Kerja Komponen Kesehatan Manusia 2024

Seiring berakhirnya pelaksanaan kegiatan program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) pada komponen Kesehatan Manusia untuk tahun 2023, Kementerian Kesehatan dan AIHSP menggelar pertemuan Program Steering Committee (PSC) pada 27 November 2023. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk melaporkan kemajuan dan mengevaluasi partisipasi aktif dari kelompok kerja terkait dalam mengawal kontribusi dan keberhasilan AIHSP selama lebih dari tiga tahun pelaksanaannya.



Pertemuan Program Steering Committee (PSC) pada 27 November 2023 dihadiri oleh (kiri-kanan): Ms. Prudence Borthwick, Ms. Madeliene Moss, dr. Imran Pambudi, MPH, dan Mr. John Leigh | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

PSC menjadi elemen kunci dalam memastikan kualitas implementasi program AIHSP, yang beroperasi di bawah Program Coordinating Committee (PCC) untuk mencapai visi dan tujuan strategis secara keseluruhan. Peran dan tanggung jawab PSC mencakup penetapan program prioritas tahunan, tinjauan rencana implementasi kegiatan, dan manajemen risiko komponen program. Pertemuan PSC untuk komponen kesehatan manusia ini pun menjadi langkah strategis dalam merumuskan kegiatan program AIHSP pada tahun terakhirnya—tahun pelaksanaan ke-4, sekaligus mengeksplorasi potensi desain program selanjutnya dengan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia, setelah program AIHSP selesai.

tidak hanya memperkuat keamanan kesehatan di tingkat lokal tetapi juga telah menjadi global leader dalam mempromosikan pendekatan One Health.” Beliau juga menekankan bahwa kontribusi dari pelaksanaan program AIHSP tidak hanya berasal dari Kementerian Kesehatan, melainkan juga pihak daerah yang turut mendapatkan manfaat positif dari investasi DFAT untuk Indonesia melalui program AIHSP. Melihat ke depan, Bapak Imran menggarisbawahi pentingnya menarik pembelajaran berharga dari implementasi teknis AIHSP. “Desain program baru harus memanfaatkan pelajaran berharga dari implementasi teknis AIHSP, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan primer untuk deteksi dini ancaman kesehatan,” tambahnya.



AIHSP capai konsensus untuk Rencana Strategis Komponen Kesehatan Manusia Tahun 2024 | Sumber: Dokumentasi AIHSP.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bapak Maxi Rein Rondonuwu menyarankan, “Rencana indikatif program AIHSP pada tahun 2024 agar terus memperhatikan dan sejalan dengan agenda transformasi kesehatan dalam pelaksanaannya. AIHSP sebaiknya tidak membuat kegiatan baru, namun lebih fokus untuk melanjutkan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, agar bisa menjadi *legacy* yang dapat dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan di lima provinsi area kerja AIHSP.”

Minister Counsellor bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia DFAT, Ms. Madeliene Moss, menegaskan apresiasinya terhadap kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Komitmen kuat telah ditunjukkan di tingkat daerah yang memungkinkan keberlanjutan program,” ujarnya. Ms. Moss menyoroti kemajuan teknis AIHSP, seperti pembentukan sistem Pusat Operasi Darurat Kesehatan dan penerapan teknologi digital untuk surveilans yang melibatkan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Bapak Imran Pambudi, menyoroti pada pentingnya aspek keberlanjutan program. Beliau menyatakan, “Program unggulan dapat menjadi *legacy* yang dapat direplikasi ke provinsi lain, terutama karena AIHSP

Dalam penutupan pertemuan PSC, Bapak Maxi menyampaikan harapannya menyusul berakhirnya masa periode implementasi program kerja AIHSP secara teknis pada Oktober 2024. Beliau mengungkapkan keinginannya agar proses perancangan fase baru program kesehatan oleh DFAT Australia dapat merujuk pada pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan oleh AIHSP bersama Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota di lima provinsi.

Pertemuan PSC berhasil mencapai konsensus untuk Rancangan Kerja Indikatif final komponen kesehatan manusia tahun 2024, validasi terhadap kemajuan kegiatan, dan konsolidasi masukan dari kelompok kerja teknis. Bukan hanya mencerminkan kesuksesan implementasi program tetapi juga menunjukkan kolaborasi yang kuat antara AIHSP, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Pertemuan ini tidak hanya mengukuhkan tekad untuk melanjutkan program di 1 tahun terakhir pelaksanaannya, tetapi juga membentuk landasan yang kuat bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakatnya.